

Ditolak Hong Kong,

Abdul Somad Minta Klarifikasi Pemerintah

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/12/24/p1ga6l366-ditolak-hong-kong-abdul-somad-minta-klarifikasi-pemerintah>

Ahad , 24 Desember 2017, 12:35 WIB

Rep: Rahmat Fajar/ Red: Ani Nursalikhah

[REPubLIKA.CO.ID](http://www.republika.co.id), JAKARTA -- [Ustaz Abdul Somad terpaksa membatalkan ceramahnya di Hong Kong karena adanya penolakan.](#) Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu (23/12) sore ketika baru mendarat di Bandara Hong Kong.

Ia diadang sejumlah orang tak berseragam dan menginterogasinya. Usai diinterogasi, Ustaz Somad lalu diantar orang-orang tersebut ke pesawat yang sama untuk kembali ke Indonesia tanpa alasan yang jelas. Kejadian tersebut ia ceritakan melalui akun *Facebooknya*.

Kuasa hukum Ustaz Somad, Kapitra Ampera mengatakan kliennya segera melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Kementerian Luar Negeri atas insiden tersebut sehingga bisa mengetahui duduk persoalannya.

"Ini penting kami lakukan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan Hong Kong itu adalah atas permintaan Pemerintah Indonesia atau Pemerintah Cina," ujar Kapitra dalam rilis yang diterima [Republika.co.id](http://www.republika.co.id), Ahad (24/12).

Protes keras juga akan dilakukan kepada pemerintah Indonesia dan Cina terkait kasus ini karena Ustaz Somad dinilai sebagai ulama yang dikagumi masyarakat Indonesia. Kasus ini juga akan dilaporkan ke DPR supaya menegur pemerintah agar serius melindungi warganya yang melakukan kunjungan ke luar negeri.

Kapitra meminta kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas. "Apakah ada order dari orang-orang tertentu yang memberikan laporan fitnah kepada imigrasi Hong Kong sehingga Ustaz Abdul Somad ditolak imigrasi memasuki wilayah Hong Kong," kata Kapitra.

Ketua Komisi I Minta Kemenlu Jelaskan

Deportasi Ustaz Somad di Hong Konng

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/24/p1g2dw415-ketua-komisi-i-minta-kemenlu-jelaskan-deportasi-ustaz-somad-di-hong-konng>

Ahad , 24 December 2017, 09:46 WIB

Rep: Hartifiany Praisra/ Red: Budi Raharjo

REPUBLICA.CO.ID, JAKARTA -- Penolakan yang dilakukan oleh petugas Bandara Internasional Hongkong pada Ustaz Abdul Somad pada Sabtu (23/12) mendapat respons dari Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis. Ia menyayangkan kejadian tersebut.

"Kementerian Luar Negeri memiliki Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler bisa menanyakan imigrasi Hong Kong mengapa mendeportasi Ustadz Abdul Somad, sehingga jelas dan tidak ada praduga" ujar Kharis dalam siaran pers yang diterima Republika Ahad (25/12).

Anggota Fraksi PKS ini menambahkan bahwa melindungi WNI adalah kewajiban negara dan merupakan amanat konstitusi seperti pada pembukaan UUD 1945. "Perlindungan WNI di luar negeri merupakan prioritas utama bagi Kemenlu RI, apabila semua WNI sudah memenuhi syarat dan administrasi prosedural dan sah untuk memasuki wilayah negara lain dan kemudian di deportasi, kita berhak menanyakan apa yang salah dari WNI terkait" lanjutnya.

Tertulis dalam Pasal 19 huruf b Undang-Undang No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri secara tegas menyatakan bahwa Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban "inter alia" antara lain memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Kharis menambahkan meski melindungi WNI adalah kewajiban negara, namun masyarakat Indonesia perlu diberi pemahaman dan kesadaran bahwa mereka harus mampu menjaga dirinya sendiri. Dia menuturkan bahwa WNI yang akan bepergian ke luar negeri harus memahami prosedur, ketentuan yang berlaku baik di Indonesia maupun di negara tujuan, hak dan kewajiban. Dan hal ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pemahaman tersebut.

"Ketika kita berada di luar negeri, dimana kewenangan Pemerintah RI dibatasi oleh adanya kedaulatan hukum di negara dimana WNI tersebut berada, Pemerintah tetap harus melindungi WNI sesuai aturan hukum Internasional dengan tetap menghormati hukum di negara tersebut" tutupnya.

Sebelumnya Ustaz Somad mengalami penolakan di Bandara Internasional Hongkong oleh pihak bandara. Disana dia diinterogasi dan dipulangkan melalui pesawat yang sama

dikeberangkatan sore hari sehingga dia tidak dapat mengisi kegiatan pengajian di Hong Kong.